PERUBAHAN ARAH LALU LINTAS ABAIKAN DAMPAK EKONOMI

Kamis, 08 Februari 2018 - Rizki Arrida

MENGURAI kemacetan, bukan solusi terbaik dalam menerapkan kebijakan perubahan arus lalu lintas di beberapa titik di kota Banjarmasin. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid menilai banyak hal yang harus menjadi pertimbangan Pemkot Banjarmasin, khususnya Dinas Perhubungan Banjarmasin dan instansi terkait dalam menerapkan rekayasa lalu lintas yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

NOORHALIS Majid menilai selama ini dampak ekonomi tidak pernah dipertimbangkan, yang semestinya dipikirkan secara komprehensif sehingga sistem satu arah yang diterapkan di ruas Jalan Veteran dan Jalan RE Martadinata, harus berdasar kajian.

"Sepatutnya, Dinas Perhubungan itu harus melibatkan institusi lain agar tak ada yang dirugikan," kata Noorhalis Majid kepada jejakrekam.com, Kamis (8/2/2018). Dia mencontohkan penutupan simpang tiga Sungai Bilu-Jalan Veteran justru memberi pengaruh terhadap para pedagang yang ada di Jalan Pahlawan. "Pendapatan mereka menurun, karena arus lalu lintas menjadi sepi, karena para pengendara bermotor harus memutar jauh," ucap Majid.

Hal yang sama, beber mantan Ketua Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin ini terjadi ketika pembatas jalan turun Jembatan Dewi ditutup yang terakses ke Jalan Achmad Yani, membuat Kampung Ketupat (Sungai Baru) yang sempat dicanangkan Pemkot Banjarmasin sebagai sentra kuliner khas Banjar menjadi sepi. "Pun halnya, dengan pemberlakuan satu arah di Jalan RE Martadinata, pasti berdampak ekonomi bagi warung dan pedagang di seputar jalan tersebut," kata Majid.

Jebolan STIE Indonesia juga memberi contoh beberapa alur lain yang memicu merosotnya pendapatan para pedagang, sebagai bukti dampak ekonomi. "Kami menyarankan agar kebijakan menutup alur jalan itu mengajak instansi lain agar terlibat. Jika perlu melibatkan para akademisi dari perguruan tinggi dalam melakukan kajian komprehensif," papar Majid.

Sangat disayangkan, menurut dia, jika selama ini yang jadi pertimbangan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin semata mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas, sementara ekonomi masyarakat menjadi mati akibat sepi dan tak laku.(jejakrekam)

Penulis : Sayyidil Ahmada

Editor : Didi G Sanusi

Foto : Didi GS